

ANALISIS KEUANGAN MENGGUNAKAN *FISCAL TREND MONITORING SYSTEM* DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

R. Muhammad Rouffie Putera Kesuma Runjung
NPP. 29.0687
Asdaf Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Keuangan Publik

Email: rouffieputra@gmail.com

ABSTRACT

Background/Problem (GAP): Finance in the macro-economic sector is a complex interrelated system. One part of the macro-economy is the implementation of the APBD which is the government's annual agenda which forms the basis for governance which must be carried out optimally and responsibly. However, in 2020 the Covid-19 Pandemic occurred which had an impact on the government financial sector which affected financial management in the government sector. **Purpose:** This study aims to determine the financial conditions and trends of the Bandung Regency government, especially in its implementation in the midst of the Covid-19 Pandemic. **Method:** This study uses a descriptive qualitative approach that explains financial conditions using the Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) theory which consists of thirteen indicators as the basis for analysis and discussion. Collecting data using semi-structured interviews, active participatory observation, and document/literacy studies. **Result:** The results of this study indicate that of the twelve financial indicators studied, there are eight financial indicators that are in good condition and four indicators that are still in poor condition. **Conclusion:** From these findings, it can be concluded that the condition of the Bandung Regency government's financial trend is in good condition.

keywords: financial conditions, financial trends, FTMS

ABSTRAK

Latar Belakang Permasalahan: Keuangan pada sektor ekonomi-makro merupakan suatu sistem kompleks yang saling berkaitan. Salah satu bagian ekonomi-makro adalah tentang pelaksanaan APBD yang merupakan agenda tahunan pemerintah yang menjadi landasan dalam pemerintahan yang harus dilaksanakan dengan optimal serta bertanggungjawab. Namun pada 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor keuangan pemerintah yang berpengaruh pada pengelolaan keuangan di sektor pemerintahan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan trend keuangan pemerintah Kabupaten Bandung, terutama dalam pelaksanaannya ditengah Pandemi Covid-19. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menjelaskan kondisi keuangan dengan menggunakan teori *Fiscal Trend Monitoring System* (FTMS) yang terdiri atas tigabelas indikator sebagai dasar dalam analisis dan pembahasan. Pengumpulan data yang menggunakan metode wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif aktif, serta studi dokumen/literasi. **Hasil:** penelitian ini menunjukkan bahwa dari duabelas indikator keuangan yang

diteliti, terdapat delapan indikator keuangan yang sudah dalam kondisi baik dan empat indikator masih dalam kondisi yang belum baik. **Kesimpulan:** Dari temuan tersebut selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kondisi trend keuangan pemerintah Kabupaten Bandung sudah dalam kondisi yang baik.

kata kunci: kondisi keuangan, trend keuangan, FTMS

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian dan keuangan yang ada di tingkat pemerintah merupakan suatu sistem yang cakupannya begitu sangat luas dan terdiri dari berbagai macam sektor yang saling mempengaruhi satu sama lain secara langsung maupun tidak. Pada perkembangannya, perekonomian dibagi menjadi dua yaitu makro-ekonomi dan juga mikro-ekonomi. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan pada sektor makro-ekonomi yang membahas tentang perekonomian dalam lingkup negara atau bagian dari masyarakat banyak (Sukirno, 2006). Pada pelaksanaan perekonomian dan keuangan pada sektor publik, penulis mendalami pada pelaksanaan urusan dan wewenang pada bidang keuangan. Dalam pelaksanaan urusan di bidang keuangan, pemerintah perlu untuk dapat menjalankannya dengan optimal serta bertanggungjawab (Kamnikar et al., 2006). Berkaitan dengan pelaksanaan bidang keuangan pemerintah selanjutnya dapat diketahui melalui kondisi keuangan dari pemerintah daerah yang didefinisikan sebagai kemampuan organisasi (pemerintah) untuk melayani, mengatasi gangguan ekonomi, serta memenuhi serangkaian tuntutan atas kebutuhan masyarakat dalam bidang keuangan pemerintah (Maher & Nollenberger, 2009). Kondisi keuangan dari pemerintah daerah juga dapat berarti sebagai kemampuan dari pemerintah dalam menghasilkan kas untuk menutupi kewajiban, menghasilkan pendapatan untuk membiayai pengeluaran, serta memastikan semua keperluan dalam bidang keuangan tercukupi oleh pemerintah daerah selaku yang bertanggungjawab dalam pengelolaannya (Groves et al., 1981). Kondisi keuangan pemerintah lingkungannya cukup luas yang dapat berarti sebagai kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat serta memenuhi kewajibannya di bidang keuangan dalam pelaksanaan pemerintahan apabila ditinjau dari konteks *fiscal health* (Hendrick, 2004).

Penulis beranggapan bahwa penting untuk mengetahui kondisi keuangan dari pemerintahan mengingat sejak akhir 2019 di Indonesia, bahkan di Dunia terjadi suatu kondisi yang dikenal sebagai Pandemi yang disebabkan oleh *Coronavirus Disease 2019* atau *Covid-19*. Kondisi pandemi tersebut berdampak pada banyak aspek dalam pemerintahan baik pusat dan daerah, termasuk pada sektor keuangan serta perekonomian pada aspek yang luas (Nasution & Muda, 2020). Pemerintah Indonesia mengeluarkan serangkaian antisipasi seperti kebijakan serta peraturan dalam menghadapi Pandemi Covid-19 tersebut yang tentunya menimbulkan efek pada sektor – sektor lain di Pemerintahan itu sendiri (Agustino, 2020). Kebijakan ataupun peraturan yang dibuat tersebut menimbulkan dampak yang beragam terhadap pemerintahan, termasuk pada pengelolaan serta pelaksanaan urusan keuangan di pemerintahan (Hertinawati, 2021). Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan dari pemerintahan di Indonesia, terlebih sejak 2019 akhir terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19. Penelitian ini dipersempit lingkungannya pada pemerintahan daerah Kabupaten Bandung untuk mempermudah serta memfokuskan pembahasan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi dari keuangan pemerintah di Kabupaten Bandung, penulis

menggunakan metode *Fiscal Trend Monitoring System* (FTMS) yang terdiri dari 13 (tigabelas) indikator dalam 5 (lima) dimensi sebagai dasar dalam analisis dan pembahasannya (Ritonga, 2014).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penulis beranggapan bahwa kondisi keuangan dari pemerintahan daerah penting untuk diketahui melalui penelitian ini untuk dapat memberikan gambaran tentang bagaimana keuangan dilaksanakan dan dikelola oleh pemerintahan daerah yang pada penelitian ini difokuskan di Kabupaten Bandung. Selain itu, dengan adanya Pandemi Covid-19 maka pelaksanaan serta pengelolaan keuangan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah merasakan dampak yang ditimbulkan dalam lingkup yang luas dalam sektor keuangan maupun perekonomian. Maka dari itu penulis menganggap hal tersebut sebagai suatu permasalahan yang perlu untuk diketahui jawabannya melalui penelitian ini. Adapun metode yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan dari pemerintahan daerah Kabupaten Bandung merupakan model *Fiscal Trend Monitoring System* (FTMS) yang dijadikan dasar dalam menganalisis serta mencari temuan dari data berupa laporan keuangan pemerintahan daerah dalam kurun waktu beberapa tahun anggaran (Ritonga, 2014).

1.3. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas serta memperdalam tentang analisis terhadap kondisi keuangan dari pemerintah daerah di Indonesia dengan metode yang beragam. Pertama, peneliti berpatokan pada penelitian dari (Indriani et al., 2020) yang menganalisis tentang bagaimana kondisi keuangan dari pemerintah di tingkat Kabupaten se-Kalimantan dengan menggunakan metode solvabilitas anggaran, solvabilitas layanan, serta kemandirian keuangan. Penelitian serupa tentang analisis terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah berasal dari penelitian (Maizunati, 2017) yang menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah dengan dimensi solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, serta solvabilitas layanan. Terdapat metode lain yang digunakan pada penelitian dari (Indrayani & Khairunnisa, 2018) yang mengukur kinerja keuangan pemerintah dengan menggunakan konsep *value for money* yang terdiri atas 5 (lima) indikator yaitu *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*.

Penelitian ini menggunakan model *fiscal trend monitoring system* (FTMS) yang menggunakan beberapa penelitian terdahulu dengan model yang sama sebagai referensi. Model FTMS diterapkan juga pada penelitian dari (Kusnadi & Ritonga, 2017) yang memiliki 15 (lima belas) indikator dalam 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi struktur hutang, dimensi basis pendapatan, serta dimensi fleksibilitas tingkat layanan. Selain itu, terdapat penelitian dari (Priyono et al., 2020) yang menggunakan model FTMS yang terdiri atas 2 (dua) faktor yaitu, faktor keuangan dan faktor lingkungan yang didalamnya terdiri atas beberapa indikator.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berfokus pada analisis atas kondisi keuangan serupa dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Indriani et al., 2020), (Maizunati, 2017), serta (Indrayani & Khairunnisa, 2018) akan tetapi model yang digunakan dalam menganalisis data keuangan/informasi keuangan dari pemerintah daerah berbeda. Penelitian ini menggunakan model *fiscal trend monitoring system* (FTMS) yang serupa dengan model penelitian dari (Kusnadi & Ritonga, 2017) dan (Priyono et al.,

2020) akan tetapi indikator dan dimensi yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian yang sama – sama menggunakan model FTMS dalam menganalisis kondisi keuangan dari pemerintah daerah.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi keuangan dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung pada kurun waktu 2015 hingga 2020 dengan menggunakan model *fiscal trend monitoring system* (FTMS). Penelitian ini juga dilaksanakan sekaligus untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan di Kabupaten Bandung pada saat pandemi Covid-19 berlangsung pada akhir 2019 sampai sepanjang tahun 2020 yang berdampak pada pemerintahan di Indonesia secara luas.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan dan meneliti informasi maupun keterangan tentang suatu gejala atau fenomena dengan apa adanya (Hikmawati, 2018). Penelitian ini menggunakan kerangka pikir induktif yang bertujuan untuk meneliti suatu gejala yang sifatnya khusus untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang umum berdasarkan dari hasil penelitian yang dilaksanakan tersebut (Simangunsong, 2015). Data – data yang digunakan pada penelitian ini berupa laporan keuangan pemerintahan daerah yang terdiri atas APBD, LRA, LO, serta Neraca pada kurun tahun anggaran 2015 hingga 2020 di Kabupaten Bandung. Selain itu, dalam rangka memperkuat informasi/data dalam penelitian ini penulis juga menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yang terdiri atas wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif aktif, serta studi dokumen/literasi (Sugiyono, 2017). Setelah informasi/data terkumpul maka penulis menggunakan teknik analisa data yang terdiri atas 5 (lima) tahapan yaitu memvalidasi data, mengorganisasi data dan informasi, menyajikan temuan, validasi temuan, serta menafsirkan dan teorisasi temuan (Indrawan & Yaniawati, 2016).

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dan dibahas menggunakan metode *fiscal trend monitoring system* (FTMS) yang terdiri atas beberapa indikator yang terdapat dalam 5 (lima) dimensi (Ritonga, 2014). Berikut rincianya:

Tabel 1.
Rincian Metode Fiscal Trend Monitoring System (FTMS)

Konsep	Dimensi	Indikator	Rumus	Trend Negatif
Analisis Keuangan Menggunakan Metode FTMS oleh (Ritonga, 2014)	Pendapatan	Pendapatan Per Kapita	Pendapatan Operasional neto / Populasi	Naik - Turun
		Pendapatan Pajak	Pendapatan Pajak	Menurun
		Surplus atau Defisit Pendapatan	Surplus atau Defisit Pendapatan / Pendapatan Operasional Neto	Meningkat
	Belanja	Belanja Per Kapita	Belanja Operasional Neto / Populasi	Meningkat
		Belanja per Fungsi	Belanja Operasional untuk Fungsi	Meningkat

		(Barang&jasa) / Total Belanja Operasional Neto	
	Belanja Tetap	Belanja Tetap (Pegawai) / Belanja Operasional Neto	Meningkat
Posisi Operasi	Surplus atau Defisit Operasional	Defisit atau Surplus Operasional Dana Umum / Pendapatan Operasional Neto	Meningkat
	Posisi Operasional Pemda	Modal Kerja Pemda atau Pendapatan Operasional	Menurun
	Likuiditas	Kas dan Investasi Jangka Pendek / Hutang Jangka Pendek	Menurun
Struktur Hutang	Hutang Jangka Pendek	Hutang Jangka Pendek / Pendapatan Operasional Neto	Meningkat
	Hutang Jangka Panjang	Hutang Jangka Panjang / Populasi	Meningkat
Kondisi Aktiva Tetap	Upaya Pemeliharaan	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap / Jumlah Kuantitas Aset	Menurun
	Belanja Modal	Belanja Modal dari Dana Operasional / Belanja Operasional Neto	Menurun

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Analisa Kondisi Keuangan Menggunakan Metode FTMS

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan di Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 2015 hingga 2020 yang diolah menggunakan metode FTMS model (Ritonga, 2014) yang terdiri atas 12 indikator yang terbagi dalam 5 dimensi. Berikut adalah hasilnya:

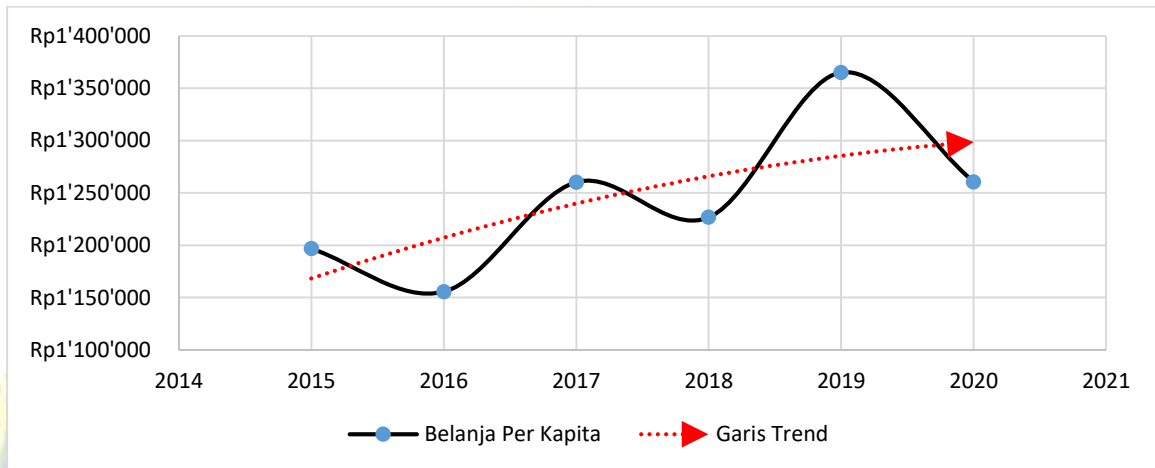
Tabel 2.**Ringkasan Hasil Pengukuran Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Menggunakan Metode FTMS**

No	Dimensi	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Trend
1	Pendapatan	Pendapatan Per Kapita	1.441.475	1.444.610	1.426.287	1.450.371	1.679.620	1.531.483	Naik (Baik)
		Pendapatan Pajak	340 Miliar	380 Miliar	464 Miliar	468 Miliar	525 Miliar	491 Miliar	Meningkat (Baik)
		Surplus (Defisit) Pendapatan	0,048	0,098	0,090	0,129	0,091	0,087	Menurun (Baik)
2	Belanja	Belanja Per Kapita	1.196.855	1.155.790	1.260.272	1.226.726	1.364.938	1.260.642	Meningkat (Tidak Baik)
		Belanja Per Fungsi	0,314	0,322	0,357	0,340	0,292	0,268	Menurun (Baik)
		Belanja Tetap	0,474	0,516	0,436	0,445	0,468	0,477	Meningkat (Tidak Baik)
3	Posisi Operasi	Surplus (Defisit) Operasional	0,016	0,077	0,125	0,139	0,130	0,118	Menurun (Baik)
		Posisi Operasional Pemda	4,4 Triliun	4,6 Triliun	5,08 Triliun	5,2 Triliun	5,7 Triliun	5,3 Triliun	Meningkat (Baik)
		Likuiditas	191%	964%	1186%	852%	634%	452%	Menurun (Tidak Baik)
4	Struktur Hutang	Hutang Jangka Pendek	0,0054	0,0047	0,0090	0,0136	0,0138	0,0158	Meningkat (Tidak Baik)
		Hutang Jangka Panjang	0,000309	0,0002075	0,0001108	0	0	0	Menurun (Baik)
5	Kondisi Aktiva Tetap	Belanja Modal	0,167	0,143	0,136	0,156	0,211	0,151	Meningkat (Baik)

Sumber : LKPD Kabupaten Bandung (2021), diolah menggunakan metode FTMS

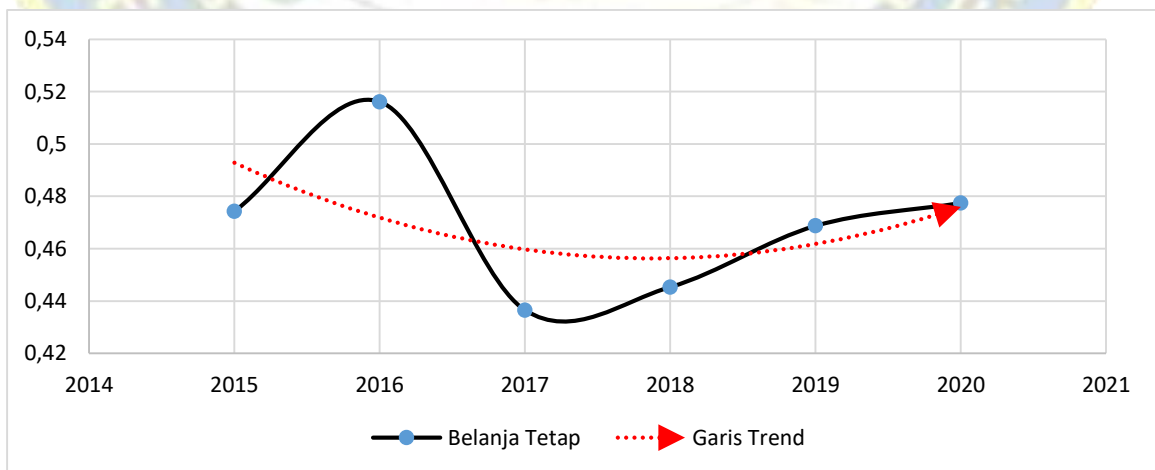
Dari hasil analisa terkait dengan kondisi keuangan di Kabupaten Bandung dengan menggunakan metode FTMS model (Ritonga, 2014) menunjukkan hasil dari 12 indikator yang diteliti, 8 indikator pada kondisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung sudah menunjukkan kondisi yang baik. Sedangkan sebanyak 4 indikator menunjukkan tidak dalam kondisi yang baik. Berikut penjelasan tentang penyebab dari 4 indikator yang tidak dalam kondisi baik pada penelitian ini:

1) Belanja per kapita



Indikator Belanja per kapita yang baik dalam metode FTMS seharusnya menunjukkan trend yang menurun dari waktu ke waktu. Sedangkan pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa indikator belanja per kapita di Kabupaten Bandung naik-turun dan memiliki trend yang mengarah pada peningkatan. Penyebab indikator belanja per kapita belum dalam kondisi yang baik dikarenakan adanya trend peningkatan dari total belanja operasional yang dilaksanakan pada kurun waktu 2015 hingga 2020 di Kabupaten Bandung yang diimbangi dengan angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung sebesar 2% / tahun.

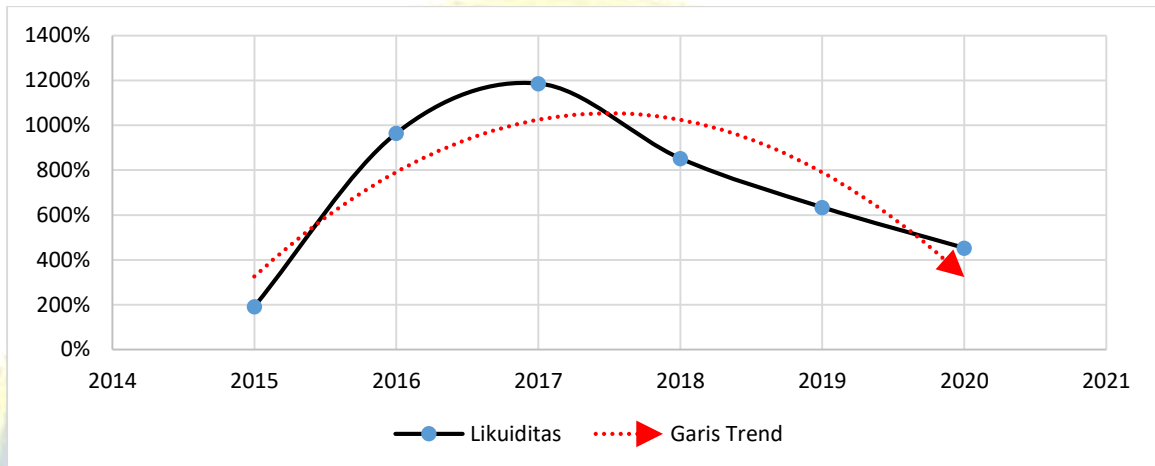
2) Belanja tetap



Indikator Belanja tetap yang baik dalam metode FTMS ditunjukkan dengan trend yang mengarah pada penurunan. Meskipun pada gambar grafik diatas menunjukkan terdapat penurunan pada 2015 hingga

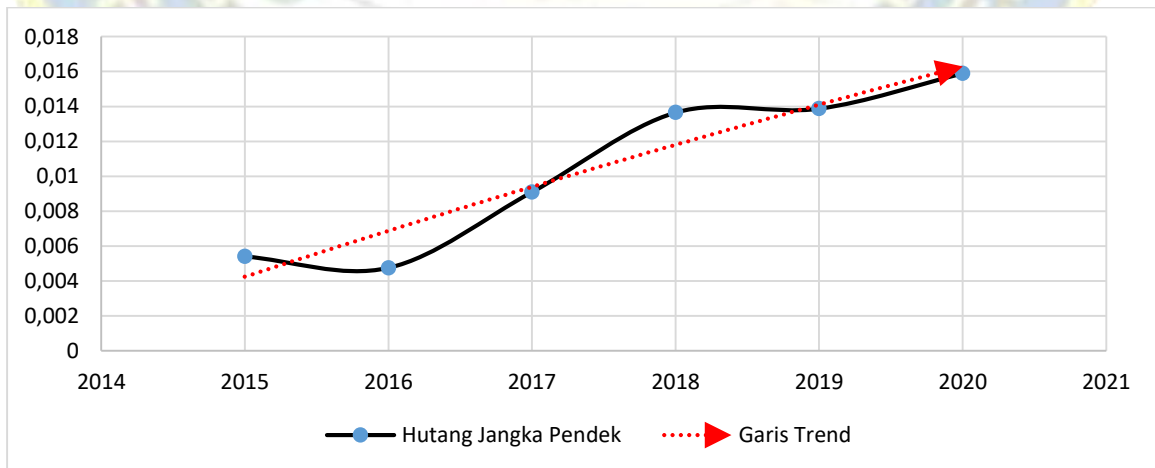
2018, namun trend pada 2019 dan 2020 cenderung kembali meningkat sehingga indikator belanja tetap masuk pada kategori tidak dalam kondisi yang baik. Penyebab indikator belanja tetap belum dalam kondisi yang baik disebabkan oleh besarnya total belanja pegawai di Kabupaten Bandung yang dalam kurun 2015 hingga 2020 berada pada kisaran 44% hingga 52% dari total belanja daerah dan besarnya cenderung meningkat disetiap tahunnya.

3) Likuiditas



Indikator likuiditas dalam metode FTMS dikatakan baik apabila memiliki trend yang meningkat. Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa trend yang ada menunjukkan penurunan yang berarti indikator likuiditas dalam penelitian ini tidak dalam kondisi yang baik. Penyebab indikator likuiditas di Kabupaten Bandung dalam kondisi yang belum baik adalah kewajiban jangka pendek di Kabupaten Bandung yang cenderung meningkat pada 2015 hingga 2020 yang juga dipadukan dengan jumlah kas daerah serta investasi jangka pendek yang semakin menurun totalnya pada 2015 hingga 2020 di Kabupaten Bandung.

4) Hutang Jangka Pendek



Indikator hutang jangka pendek dalam metode FTMS dikatakan sudah baik apabila memiliki trend yang mengarah pada penurunan. Namun pada grafik di atas trend pada penelitian ini mengarah pada

peningkatan dalam kurun waktu 2015 hingga 2020. Penyebab indikator hutang jangka pendek tidak dalam kondisi yang baik di Kabupaten Bandung disebabkan oleh adanya kegiatan/program yang sudah dilaksanakan namun pembayarannya tidak dilaksanakan dalam satu tahun anggaran yang sama, adanya kewajiban kepada pihak ketiga atas barang ataupun jasa yang telah diterima/digunakan pemerintah daerah, adanya keterlambatan penerbitan SK bagi PNS dan juga PPPK yang ada di Kabupaten Bandung sehingga beban gaji dan tunjangan kemudian dicatat sebagai kewajiban jangka pendek sehingga indikator hutang jangka pendek meningkat dalam kurun waktu 2015 hingga 2020.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 12 (dua belas) indikator yang diteliti, terdapat 8 (delapan) indikator sudah dalam kondisi baik dan 4 (empat) indikator masih belum baik yang berarti indikator yang ada dominan dalam kondisi yang baik. Hal tersebut serupa dengan hasil temuan dalam penelitian (Priyono et al., 2020) yang menunjukkan bahwa dari faktor keuangan di pemerintahan daerah yang terdiri atas 9 (sembilan) indikator, 8 (delapan) indikator menguntungkan dan hanya 1 (satu) indikator yang belum menguntungkan. Indikator yang sama – sama menunjukkan trend positif dari kedua penelitian adalah indikator pendapatan pajak. Sedangkan untuk indikator hutang jangka pendek pada kedua penelitian sama – sama memiliki trend yang negatif.

Beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model FTMS yang dikembangkan dalam penelitian (Kusnadi & Ritonga, 2017) yang memiliki 15 (lima belas) indikator yang telah diuji dan layak untuk digunakan sebagai dasar analisis terhadap kondisi keuangan pemerintahan daerah di Indonesia. Hasil analisis serta temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta masukan bagi pemerintah daerah di Indonesia dalam memprediksi, mencegah, menangan, dan meredakan suatu permasalahan keuangan sesuai dengan hasil dari penelitian dari (Kusnadi & Ritonga, 2017).

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Terdapat beberapa fakta terkait indikator yang telah diteliti dalam penelitian ini. Indikator belanja per kapita penulis identifikasikan memiliki trend yang naik – turun karena disetiap tahun mengalami penurunan dan peningkatan pada tahun selanjutnya meskipun secara trend cenderung mengarah pada peningkatan. Indikator belanja tetap di Kabupaten Bandung yang terdiri atas belanja pegawai dikategorikan masih boros karena pada 2015 hingga 2020 total belanja pegawai terkecil adalah sebesar 44% dari total belanja daerah Kabupaten Bandung. Selain karena boros, indikator belanja tetap juga mengarah pada trend meningkat yang menandakan total dari belanja pegawai cenderung meningkat meskipun bobotnya tidak proporsional. Indikator likuiditas memiliki trend yang menurun pada 2015 – 2020 meskipun pada titik terendahnya, likuiditas di Kabupaten Bandung berada pada angka 452% yang berarti tingkat likuiditasnya tinggi. Namun karena penelitian ini berbicara soal trend, maka angka indikator dari likuiditas di Kabupaten Bandung dikategorikan tidak dalam kondisi yang baik karena memiliki trend yang menurun. Sedangkan untuk indikator hutang jangka pendek di Kabupaten Bandung memiliki trend meningkat yang berarti tidak dalam kondisi yang baik disebabkan adanya peningkatan pada penggunaan barang/jasa yang diterima dimuka.

IV. KESIMPULAN

Sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi keuangan dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung sudah dalam keadaan serta kondisi yang baik dengan

dianalisis menggunakan metode FTMS melalui 12 indikator dalam 5 dimensi yang diteliti. Kesimpulan kondisi keuangan yang sudah baik tersebut didasarkan pada terdapatnya 8 (delapan) indikator yang sudah dalam keadaan baik dan untuk indikator yang belum dalam keadaan yang baik sebanyak 4 (empat) indikator.

Keterbatasan Penelitian. Penulis menyadari bahwa penelitian ini terbatas pada lingkup dan kesempatan waktu dalam penelitiannya sehingga pada penelitian ini hanya menyajikan data dari hasil analisis dan pembahasan atas kondisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Dengan dilaksanakannya penelitian dengan menggunakan model FTMS untuk mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah ini maka besar harapan penulis agar kedepannya model FTMS ini banyak digunakan untuk dasar analisis bagi penelitian yang bertemakan tentang kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan masukan serta nasehat dalam rangka melaksanakan penelitian hingga pada akhirnya naskah ini dapat diselesaikan dan dipublikasikan. Besar harapan penulis agar kedepannya penelitian serupa dapat dilaksanakan dan dikembangkan sehingga penelitian ini dapat berguna bagi berbagai pihak.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 : Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 253–270. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.685>
- Groves, S. M., Godsey, W. M., & Shulman, M. A. (1981). Financial Indicators for Local Government. *Public Budgeting and Finance*, 1(2), 5–19.
- Hendrick, R. (2004). Assessing and Measuring the Fiscal Health of Local Government: Focus on Chicago Suburban Municipalities. *Urban Affairs Review*, 40(1), 78–114.
- Hertinawati. (2021). Analisa terhadap Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Wabah Pandemi Covid-19. *Jurnal Sekuritas*, 4(1), 118–130.
- Hikmawati, F. (2018). *Metodologi Penelitian* (Cet.2). Rajawali Pers.
- Indrawan, R., & Yaniawati, P. (2016). *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. PT. Refika Aditama.
- Indrayani, & Khairunnisa. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1–10.
- Indriani, I. K., Lestari, M. P., & Triani, M. (2020). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten di Kalimantan. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 175–183.
- Kamnikar, J. A., Kamnikar, E. G., & Deal, K. H. (2006). Assessing a State's Financial Condition. *The Journal of Government Financial Management*, 55(3), 30–36.

- Kusnadhi, F. H., & Ritonga, I. T. (2017). Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(1).
- Maher, C. S., & Nollenberger, K. (2009). Revisiting Kenneth Brown's "10-Point Test." *Government Finance Review*, 25(5), 61–66.
- Maizunati, N. A. (2017). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam Klaster Kota di Jawa - Bali. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 2(2), 140–162.
- Nasution, D. A. D., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212–224. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Priyono, N., Fatimah, A. N., Bharata, R. W., & Arifah, S. (2020). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dengan Model Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) di Kota Magelang. *Journal of Public and Business Accounting*, 2, 1(2), 1–11.
- Ritonga, I. T. (2014). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Cetakan I). Pustaka Pelajar.
- Simangunsong, F. (2015). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Literatur IPDN.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2006). *Makro Ekonomi : Teori Pengantar*. PT. Raja Grafindo.

